

Mark Up Anggaran Mesti Diklarifikasi

Widi Aryadi

Borneo Tribune, *Kubu Raya*

Terkait dengan adanya kebocoran dana di Pemerintah Provinsi Kalbar yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK), Pengamat Politik, Drs Gusti Suriansyah, M.Si mengatakan seharusnya ada klarifikasi dari pemerintah terhadap hasil audit tersebut. Tunjukkan di pos atau item apa saja kebocoran tersebut ditemukan.

....Ke Halaman -11

Mark Up Anggaran Mesti Diklarifikasi

"Kebocoran tersebut terjadi akibat adanya mark up (peningkatan, red) anggaran atau penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu semua harus diberikan klarifikasinya agar jelas permasalahan yang terjadi," kata Gusti.

Dosen pasca sarjana di Magister Sosial ini menuturkan kemungkinan terjadinya mark up bisa saja terjadi, misalnya di pos A seharusnya budgetnya 100 kemudian dibesarkan menjadi sekian kali lipat oleh pihak tertentu. Kemudian

penggunaan dari dana yang ada tidak sesuai dan tidak efektif dari yang seharusnya.

"Kemungkinan penggunaannya tidak efektif dari pihak terkait. Juga bisa jadi ada dana yang fiktif. Untuk itu BPK harus memberikan klarifikasi mengenai hasil temuan tersebut agar semuanya bisa menjadi jelas," ucap Gusti.

Menurut Gusti eksekutif harus mempunyai indikasi hukum karena hal tersebut sudah masuk ke ranah korupsi berkenaan dengan anggaran pembangunan. BPK harus melaporkan kepada

pihak yang berwajib kalau indikasinya memang ke ranah hukum.

"BPK bisa melaporkan ke pihak yang berwajib jika indikasinya memang ke ranah hukum. Pemerintah juga harus meminta klarifikasi kepada BPK mengenai temuan tersebut. Banyak indikasi yang bisa dilihat dengan kemungkinan adanya mark up anggaran tadi. Bisa juga dalam masa anggaran ada pembelian sesuatu barang namun tidak dibelikan, karena tidak ada bukti fisik sehingga menjadi salah satu temuan BPK," tutur Gusti.